

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Awang, A. 2010. *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Giroth, Lexie. M, 2004. *Status dan peranan pendidikan pamong praja indonesia*. Indrapura.
- Kemensos RI. 2009. *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Komunitas Adat Terpencil 2010-2014*. Mentri Sosial. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi –Jilid 1, Cetakan Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2013 *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Penegembangannya*. Edisi Refisi. Jakarta Rajawali Pers.
- Mardikanto, T. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta CV. Bandung.
- Nugroho. 2004 *Kebijakan publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakrta PT Media Elex Komputindo
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Ndraha Taliziduhu., 2003 *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka
- _____,2010 *Metodologi Ilmu Pemerinthan* Jakarta, Rineka
- _____, 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintah Baru)* . Jakarta. Rineka Cipta.
- Rauf, Rahyunir. 2001. *Menuju RT/RW Profesional*. Pekanbaru, Yayasan Riau Prestsi
- _____.2005. *Kelembagaan RT/RW Profesional*. Pekanbaru, Yayasan Riau Prestasi
- Rasyid, Ryas. 1998. *Pemerintahan yang amanah*. Jakarta, Bina Rena Pariwisata

_____. 2002. *Menolak Resentralisasi pemerintahan*. Jakarta Milenium

Rineka, Cipta. 2011 *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) .* Jakarta. Rineka Cipta

Soekanto, Soejorno. 2001.. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo.

Syafiie, inu kencana. 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung, PT Refika Aditama

_____. 2007, *ilmu pemerintahan, edisi revisi*. Bandung : Mandar Maju.

Widjaja, H.A. W. 2003. *Otonomi desa*, jakarta. PT. Raja Grfindo Persada.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial